

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis, juga mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke depan. Bentuk penegasan terhadap sistem demokrasi tersebut ialah dengan diadakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), hal ini atas dasar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sekarang diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah sangat jelas diatur tentang sosialisasi politik, namun pada tataran implementasi masih saja banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, tidak terkecuali di Kabupaten Garut.

Pelaksanaan Pemilukada, baik pemilihan Bupati atau Walikota, dilaksanakan secara langsung oleh rakyat Indonesia di Kabupaten/Kota Indonesia berdasarkan pada undang-undang dasar 1945 amandemen ke-2 yang berbunyi “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala

Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan kota dipilih secara Demokratis”. Tentunya Pemilukada dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, jika sebelum pelaksanaannya sampai pada pelaksanaannya dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah kabupaten maupun kota daerah pemilihan.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan serta mengajak masyarakat untuk turut ikut serta dalam pelaksanaan pemilu serta kegiatan politik lainnya yang ada kaitannya dengan keputusan yang harus diambil oleh pemerintah. Sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010, yang terdiri dari :

1. Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia;
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

5. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Proses sosialisasi ini pada umumnya berlangsung seumur hidup yang diperoleh seseorang baik sengaja melalui pendidikan formal dan informal maupun secara tidak sengaja melalui pengalaman sehari-harinya baik di dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi yang terjadi proses sosialisasi ini juga dapat diperoleh seorang individu baik secara sengaja ataupun tidak sengaja melalui transformasi media baik itu media elektronik maupun cetak.

Pada tahun 2013, KPU kabupaten Garut sebagai penyelenggara pemilukada dalam pemilihan Bupati Kabupaten Garut melaksanakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan terhitung satu tahun sebelum pelaksanaan pemilukada dilakukan, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kabupaten Garut dalam menggunakan hak pilihnya. Bentuk sosialisasi yang dilakukan ialah berupa :

1. Kegiatan cerdas cermat untuk pemilih pemula yang diikuti oleh perwakilan kecamatan SLTA yang ada di Kabupaten Garut;
2. Sosialisasi pendukung dengan pemasangan media sosialisasi dalam bentuk baligho, spanduk, pembuatan leaflet, bookleat, banner, dll;
3. Pembentukan relawan demokrasi;
4. Pendistribusian anggaran sosialisasi untuk kecamatan di Kabupaten Garut;

5. Siaran radio (dialog interaktif, iklan layanan masyarakat, dan pengumuman).

Namun pelaksanaan sosialisasi tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan masih ditemukan beberapa permasalahan yang dianggap krusial. Permasalahan tersebut ialah dimana media sosialisasi yang digunakan dalam upaya sosialisasi pemilukada tahun 2013 dalam bentuk reklame, baligho, dan spanduk dianggap tidak strategis, dikarenakan pemasangan media tersebut hanya di titik-titik tertentu saja, sehingga memungkinkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui informasi sosialisasi pemilukada tahun 2013.

Kemudian permasalahan yang selanjutnya adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pemilih dan Yang Menggunakan Hak Pilih**  
**Pada Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Garut 2008**

<b>Pemilu/Putaran</b>	<b>Jumlah Pemilih</b>	<b>Yang Menggunakan Hak Pilih</b>	<b>Persentase</b>
2008/Pertama	1.581.504	1.040.007	66,3%
2008/Kedua	1.583.659	985.898	62,3%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut

Pada penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Garut pada tahun 2008 di laksanakan 2 (dua) putaran, untuk pelaksanaan putaran pertama Daftar Pemilih Tetap sebanyak 1.581.504 (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Lima Ratus Empat). Sementara jumlah suara sah sebanyak 1.006.664, dan jumlah suara tidak sah sebanyak 42.493. jumlah partisipasi pemilih sebanyak 1.040.007 yang dapat dipresentasikan menjadi 66,3% pengguna hak pilih. Kemudian pada pelaksanaan

putaran kedua Daftar Pemilih Tetap sebanyak 1.583.659. Sementara suara sah sebanyak 958.552, dan jumlah suara tidak sah sebanyak 27.346. Jumlah Partisipasi sebanyak 985.898 yang dapat dipresentasikan 62,3% Pengguna hak pilih.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pemilih dan Yang Menggunakan Hak Pilih**  
**Pada Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Garut 2013**

<b>Pemilu/Putaran</b>	<b>Jumlah Pemilu</b>	<b>Yang Menggunakan Hak Pilih</b>	<b>Persentase</b>
2013/Pertama	1.760.130	1.145.987	65,11%
2013/Kedua	1.760.130	1.071.523	60,88%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut

Kemudian pada pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Garut pada tahun 2013 juga di laksanakan sebanyak 2 (dua) putaran, pada pelaksanaan putaran pertama data pemilih tetap sebanyak 1.760.130. sementara jumlah suara sah sebanyak 1.106.327, dan jumlah suara tidak sah 39.660, partisipasi pemilih 1.145.987 jika dipresentasikan 65.11%. kemudian pada pelaksanaan pemilihan putaran kedua data pemilih tetap 1.760.130. sementara jumlah suara sah sebanyak 1.041.933, dan jumlah suara tidak sah 29.590. partisipasi pemilih 1.071,523 yang jika dipresentasikan 60.88%.

Permasalahan lain dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pemilu pada tahun 2013 di Kabupaten Garut, dimana terjadinya ketimpangan jumlah relawan demokrasi untuk 42 kecamatan dengan masing-masing jumlah penduduk tiap kecamatan terdiri dari ribuan jiwa. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.3**  
**Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tiap Kecamatan di Kabupaten Garut**  
**Tahun 2013**

No	PPK Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Pemilih Tetap (DPT) model A3			Ket
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Garut Kota	11	220	44.771	44.141	88.912	
2	Karangpawitan	20	193	43.782	42.582	86.364	
3	Wanaraja	9	74	17.176	16.681	33.857	
4	Sucinaraja	7	47	10.367	10.215	20.582	
5	Pangatian	8	64	14.648	13.986	28.634	
6	Cilawu	18	165	37.975	37.206	75.181	
7	Bl. Limbangan	14	120	28.843	27.369	56.212	
8	Selaawi	7	62	14.150	13.431	27.581	
9	Malangbong	24	191	43.085	40.980	84.065	
10	Kersamanah	6	60	13.375	12.540	25.915	
11	Kadungora	14	147	33.479	32.020	65.499	
12	Cibiuk	5	52	11.776	10.592	22.368	
13	Cibatu	11	119	25.770	24.821	50.591	
14	Leles	12	124	28.107	26.996	55.103	
15	Leuwigoong	8	74	17.725	16.480	34.205	
16	Sukawening	11	93	19.853	18.742	38.595	
17	Karantengah	4	30	6.303	6.293	12.596	
18	Tarogong kidul	12	170	37.566	37.458	75.024	
19	Tarogong kaler	13	141	32.446	31.588	64.034	
20	Samarang	13	113	25.752	24.743	50.495	
21	Pasirwangi	12	95	22.957	21.668	44.625	
22	Banyuresmi	15	139	32.111	29.160	61.271	
23	Sukaesmi	7	63	13.871	13.101	26.972	
24	Cisurupan	17	141	33.953	33.653	67.606	
25	Bayongbong	18	147	34.723	33.332	68.055	
26	Cigedug	5	58	13.751	12.875	26.626	
27	Cikajang	12	121	27.970	27.661	55.631	
28	Banjarwangi	11	85	20.636	19.723	40.359	
29	Singajaya	9	76	16.696	16.478	33.174	
30	Cihurip	4	33	6.581	6.453	13.034	
31	Peundeuy	6	38	7.984	7.893	15.877	
32	Talegong	7	62	11.299	11.370	22.669	

33	Cisewu	9	65	13.343	13.221	26.564	
34	Caringin	6	58	10.848	10.655	21.503	
35	Bungbulang	13	112	21.324	21.293	42.617	
36	Pamulihan	5	36	6.569	6.495	13.064	
37	Pakenjeng	13	106	24.111	23.857	47.968	
38	Mekarmukti	5	33	5.825	5.857	11.682	
39	Cikelet	11	75	14.350	14.261	28.611	
40	Cisompet	11	99	18.558	18.249	36.807	
41	Pameungpeuk	8	83	14.582	14.779	29.361	
42	Cibalong	11	80	15.306	14.985	30.291	
	<b>Jumlah Total</b>	<b>442</b>	<b>4.064</b>	<b>894.297</b>	<b>865.833</b>	<b>1.760.130</b>	

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut

Indikasi lain dari permasalahan di atas, ialah jumlah relawan demokrasi lebih sedikit dibanding jumlah kecamatan yang tersedia di Kabupaten Garut, sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 1.4**  
**Data relawan demokrasi pemelukada 2013**

No	Nama Relawan	Segmen	Dapil (Daerah Pemilihan)
1	Willy Sumantri	Segmen Pemilih Pemula	Daerah Pemilihan 1
2	Ajat Sudrajat	Segmen Pemilih Pemula	Daerah Pemilihan 1
3	Panji Nurman Patama	Segmen Pemilih Pemula	Daerah Pemilihan 2
4	Jaya Wardanu	Segmen Pemilih Pemula	Daerah Pemilihan 4
5	Diman Nurjaman	Segmen Pemilih Pemula	Daerah Pemilihan 4
6	Rizal Jaelani	Segmen Pemilih Pemula	Daerah Pemilihan 3
7	Sadilah Jatnika	Segmen Pemilih Pemula	Daerah Pemilihan 5
8	Irpan Arif Mughni	Segmen Pemilih Pemula	Daerah Pemilihan 5
9	Amany Iskandar	Segmen Perempuan	Daerah Pemilihan 5
10	Wilda Juliana	Segmen Perempuan	Daerah Pemilihan 4
11	Yessy Fitriyani	Segmen Perempuan	Daerah Pemilihan 1
12	Agisti Maharani	Segmen Perempuan	Daerah Pemilihan 3

13	Hj. Ai Kartani K	Segmen Perempuan	Daerah Pemilihan 2
14	H. Aceng Ishak	Segmen Agama	Daerah Pemilihan 4
15	Iwan Setiawan	Segmen Agama	Daerah Pemilihan 1
16	Aceng Basir	Segmen Agama	Daerah Pemilihan 2
17	Indra Komarudin	Segmen Agama	Daerah Pemilihan 5
18	Ust. Taufiqrohman	Segmen Agama	Daerah Pemilihan 3
19	Umar, S.Pdi	Segmen Agama	Daerah Pemilihan 5
20	Dani Husana	Segmen Pinggiran	Daerah Pemilihan 5
21	Yedi Nuryadi	Segmen Pinggiran	Daerah Pemilihan 4
22	Deden Tresna Suryadi	Segmen Pinggiran	Daerah Pemilihan 1
23	Miko Yulio	Segmen Pinggiran	Daerah Pemilihan 5
24	Asep Yayan Heryana	Segmen Pinggiran	Daerah Pemilihan 2
25	Anwar Buhori	Segmen Pinggiran	Daerah Pemilihan 3
26	Rd. Mas Sugeng R	Segmen Disabilitas	Daerah Pemilihan 3
27	Hidayat Dipayana	Segmen Disabilitas	Daerah Pemilihan 4
28	Nandang Wahyudin	Segmen Disabilitas	Daerah Pemilihan 5
29	Didi Suryadi	Segmen Disabilitas	Daerah Pemilihan 2
30	Holil Nandang S	Segmen Disabilitas	Daerah Pemilihan 1

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut

Dari pernyataan di atas, terbukti bahwa kegiatan sosialisasi pemilu pada tahun 2013 Kabupaten Garut yang dilakukan melalui beberapa upaya guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, masih terdapat permasalahan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EVALUASI KEGIATAN SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN 2013”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan berbagai permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Tingkat partisipasi masyarakat rendah;
2. Penempatan Baligho sebagai media sosialisasi pemilu tahun 2013 dianggap tidak strategis;



3. Sarana kegiatan sosialisasi pemilukada tahun 2013 melalui audiovisual (radio) dianggap kurang efektif;
4. Tidak seluruhnya SLTA se-Kabupaten Garut mengikuti kegiatan cerdas cermat dalam upaya memberikan sosialisasi kepada pemilih pemula;
5. Adanya ketimpangan antara relawan demokrasi dengan banyaknya jumlah kecamatan di Kabupaten Garut.

### **C. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan masalah pokok di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ialah bagaimana evaluasi kegiatan sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut Tahun 2013?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada di atas maka tujuannya yaitu untuk mengevaluasi kegiatan sosialisasi pemilihan umum kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2013.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai berikut:

1. Secara teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia politik, khususnya dalam pelaksanaan sosialisasi politik. Adapun kegunaannya adalah:

a. Untuk penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan di bidang ilmu politik, terutama sebagai pembelajaran dan memberikan informasi mengenai evaluasi sosialisasi politik.

b. Untuk lembaga

Memberikan sumbangan penelitian dalam bidang politik yang ada kaitannya dengan masalah evaluasi sosialisasi politik.

c. Untuk KPU Kabupaten Garut

Memberikan masukan kepada KPU Kabupaten Garut yang dapat digunakan sebagai evaluasi untuk pelaksanaan sosialisasi politik.

2. Secara praktis

a. Untuk penulis

Dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam membuat karya tulis ilmiah.

b. Untuk lembaga

Sebagai bahan pustaka bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai pelaksanaan sosialisasi politik sehingga dapat mencari alternatif pemecahan masalah dengan masalah yang sama.

c. Untuk KPU Kabupaten Garut

Memberikan informasi atau gambaran kepada masyarakat agar lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Administrasi publik menurut Nicholas Henry (1988), yang dikutip dalam (Pasolong, 2014: 8) mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan pemerintah juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Mufham Al-amin dalam bukunya Manajemen Pengawasan (2006:97) mengatakan bahwa Evaluasi berarti suatu kegiatan mencakup penilaian terhadap laporan atau hasil dari suatu program yang telah dilaksanakan. Ada tiga jenis sasaran utama dalam melakukan evaluasi, yaitu: Evaluasi Terhadap Kegiatan, Evaluasi Terhadap Program dan Evaluasi Terhadap Kebijakan.

Pengertian Evaluasi yang menurut teori diatas yaitu mempunyai tiga jenis sasaran diantaranya evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan menunjukkan pencapaian kinerja suatu unit kerja dalam suatu kurun waktu tertentu, evaluasi terhadap program merupakan hasil kumulatif dari berbagai kegiatan yang dilakukan dengan cara mengambil hasil dari setiap nilai capaian kinerja kegiatan tersebut dan kemudian memberikan pembobotan untuk dapat diperoleh nilai capaian program dan evaluasi terhadap kebijakan yaitu merupakan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan dan peraturan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dalam

menentukan suatu kebijaksanaan. Dimensi dari evaluasi menurut Ismail Nawawi adalah:

- 1) Efektifitas: Adanya hasil yang dicapai
- 2) Kecukupan: Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah.
- 3) Pemerataan:
  - a) Adanya biaya distribusi merata kepada kelompok masyarakat.
  - b) Adanya manfaat distribusi merata kepada kelompok masyarakat.
- 4) Responsivitas: Adanya hasil yang memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan.
- 5) Ketepatan: Adanya hasil yang dicapai bermanfaat.

Menurut Michael Rush dan Philip Althop, sosialisasi politik adalah suatu proses memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksi terhadap gerak gejala politik (Damsar, 2010: 153).

Dalam penyampaian pesan politik, sangat diperlukan sarana sebagai suatu penunjang berlangsungnya sosialisasi politik. Yang merupakan sarana penunjang dari sosialisasi politik tersebut adalah:

1. Keluarga
2. Sekolah
3. Kelompok teman sebaya

4. Tempat kerja
5. Media massa
6. Kontak-kontak politik langsung

Dari segi bentuk dan metode penyampaian pesan politik, sosialisasi politik dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1. Pendidikan politik

Pendidikan politik merupakan suatu proses yang dialogik antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma dan simbol politik negara dari berbagai pihak dalam sistem politik, seperti sekolah, pemerintah, partai politik dan peserta didik dalam rangka pemilih yang dipandang ideal dan baik.

2. Indoktrinasi politik

Indoktrinasi politik merupakan proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma dan simbol yang dianggap mereka sebagai ideal dan baik. Melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan psikologis dan latihan yang penuh disiplin.

Menurut Rush dan Althoff (1997:40) dalam (Handoyo, 2013: 215), ada tiga dimensi mekanisme sosialisasi yaitu:

1. Imitasi

Imitasi merupakan peniruan terhadap tingkah laku individu-individu lain. Imitasi penting dalam sosialisasi masa kanak-kanak. Pada masa remaja dan dewasa, imitasi lebih banyak bercampur dengan kedua

mekanisme lainnya, sehingga satu derajat peniruan terdapat pula pada instruksi maupun motivasi. Imitasi merupakan proses sosial atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain, baik sikap penampilan, gaya hidupnya, bahkan apa-apa yang dimilikinya. Imitasi pertama kali muncul di lingkungan keluarga, kemudian lingkungan tetangga dan lingkungan masyarakat. Imitasi tidak berlangsung secara otomatis melainkan dipengaruhi oleh sikap menerima dan mengagumi terhadap apa yang di imitasi. Untuk mengadakan imitasi atau meniru ada faktor psikologis lain yang berperan.

## 2. Instruksi

Instruksi merupakan peristiwa penjelasan diri. Seseorang dengan sengaja dapat ditempatkan dalam suatu situasi yang instruktif sifatnya, dalam sebuah politik. Misalnya dalam beraneka tipe pendidikan kejuruan sambil bekerja dan beberapa diantaranya agaknya relevan dengan tingkahlaku politik. Dalam bersosialisasi arahan merupakan suatu yang penting, dalam tingkahlaku politik melakukan tingkahlaku politik dan warga negara atau interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan hukum. Praktek dari beberapa organisasi atau kelompok-kelompok perorangan yang menjelma menjadi kelompok-kelompok diskusi merupakan tipe instruksi formal.

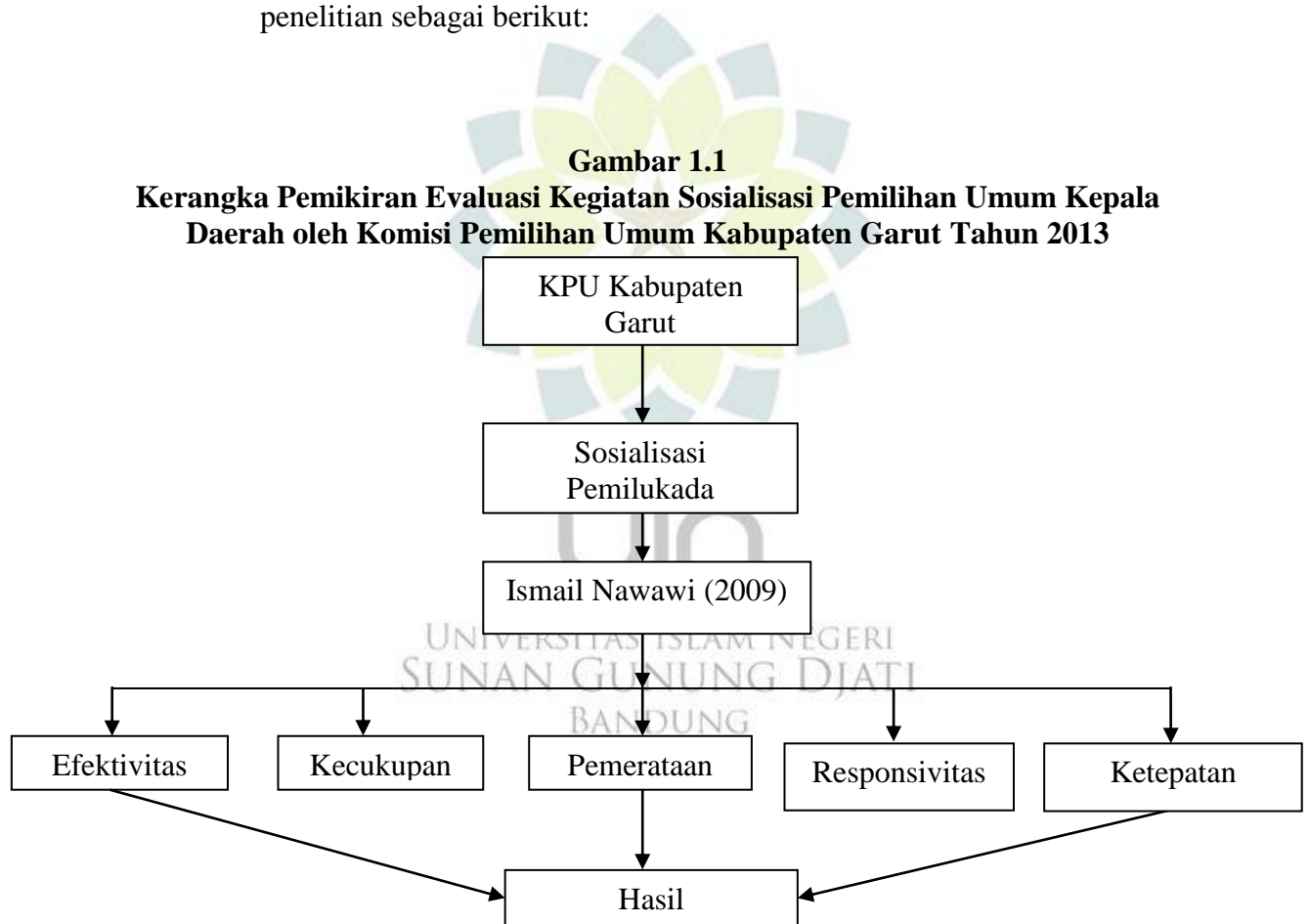
### 3. Motivasi

Motivasi sebagaimana dijelaskan bentuk tingkahlaku yang tepat cocok yang dipelajari melalui proses coba-coba dan gagal (*trial and error*). Individu yang bersangkutan secara langsung belajar dari pengalaman mengenai tindakan sama cocok dengan sikap-sikap dan pendapat-pendapat individu contohnya seseorang akan mengetahui tentang politik jika adanya pendapat-pendapat dari individu dan itu bisa dari lingkungan, pergaulan dan lain-lain. Motivasi juga mempengaruhi perubahan yang terjadi pada diri seseorang. Dalam pengalaman mengenai tindakan merupakan mengisi akal pikiran secara sadar akan pentingnya politik. Pengetahuan individu terisi dengan fantasi, pemahaman, dan konsep lahir dari pengamatan dan pengalaman mengenai berbagai macam hal yang berbeda dengan lingkungan individu tersebut.

Jika imitasi dan instruksi merupakan tipe khusus dari pengalaman, sementara motivasi lebih banyak diidentifikasi dengan pengalaman pada umumnya. Pengalaman yang diperoleh individu dari berbagai metode tersebut merupakan variabel kunci dari model dimana tingkahlaku politik seseorang untuk sebagian ditentukan oleh banyaknya pengalaman. Pengalaman, nilai-nilai dan sikap seseorang jelas menunjang atau memberikan pengaruh terhadap pengalamannya. Dengan cara yang sama, proses transmisi dari pengetahuan nilai-nilai dan sikap-sikap melalui bermacam-macam agn sosialisasi semuanya

merupakan bentuk pengalaman-pengalaman sendiri dan pada waktunya dipengaruhi dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman lainnya. Dengan demikian, pengalaman individu yang relevan secara politis muncul dari sosialisasi politik dan jelas memberikan kontribusi pada proses sosialisasi politik.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dibuat model penelitian sebagai berikut:



Sumber: Hasil penelitian (diolah peneliti, 2018)